



# KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- Bangka Pos
- Babel Pos
- Babel News
- Radar Bangka
- Rakyat Pos
- Lainnya: \_\_\_\_\_

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

## BPK Didesak Periksa Program SKPD

**PANGKALPINANG** - Pemuda Pancasila (PP) Pangkalpinang mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Tipikor Pol-da, dan Kejaksaan untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan yang digelar oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel).

Wakil Ketua PP Pangkalpinang Edi Sunanta menilai, kegiatan yang dilaksanakan hanya sekedar acara seremonial belaka untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Bahkan, setiap kegiatan

• Baca | **BPK ...** | Hal 6

### BPK ...

dari Halaman 5

yang digelar tak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, dimana pada acara tersebut dituding ada item-item yang dipangkas untuk masuk ke kantong panitia penyelenggara.

"Seperti kegiatan yang digelar Kesbangpol Babel kemarin, baik itu kegiatan raker pengurus pusat pendidikan wawasan kebangsaan maupun penyuluhan narkoba yang terkesan hanya asal dilaksanakan untuk mencairkan anggaran. Dalam kegiatan raker wawasan kebangsaan dilaksanakan di hotel dengan peserta yang hanya belasan orang, inikan jelas terlihat kalau cuma untuk menghabiskan anggaran saja, dan dilaporkan nanti dibesarkan kegiatan ini agar bisa ma-

suk kantong," katanya, Senin (28/3) kemarin.

Untuk kegiatan wawasan kebangsaan saja sambung dia, akan digelar sebanyak 6 kegiatan, dengan pagu anggaran setiap kegiatan diatas Rp200 jutaan, dari kegiatan ini dinilai tak efektif. "Dari sana akan terlihat, berapa banyak narasumber yang hadir, dan peserta. Dan kegiatan ini setiap peserta akan mendapatkan uang transport, kita lihat besarnya apakah sesuai dengan pagunya, kemudian konsumsi saja itu bisa Rp35 jutaan, dan banyak lagi belanja lain yang bisa dimanfaatkan," tukasnya.

Lebih lanjut Edi menilai, hal ini dilakukan lantaran saat ini pemerintah tak berani melaksanakan program fisik

infrastruktur sehingga untuk memanipulasi dana dialihkan kepada program sosialisasi dan kegiatan yang digelar. "Seperti kegiatan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan narkoba yang digelar di puncak hotel sasaran kegiatan ini untuk menekan peredaran narkoba tetapi pesertanya dipersempit untuk aparatnya pemerintah, bahkan media massa saja tak dilibatkan sebagai peserta padahal jelas lebih berperan media untuk menyebarluaskan informasi ini. Untuk itu, kami minta agar BPK, dan aparat penegak hukum lainnya untuk membuka mata dan lebih jeli dalam melihat mana yang hanya menghabiskan anggaran dan mana yang untuk kepentingan rakyat," tandasnya. (iam)